

## PENGARUH PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (TAHUN 2013-2015)

Oleh: Moh Agus Nugroho, Rika Febby Rhamadhani

Alumni Pascasarjana UII Yogyakarta, Mahasiswa Pascasarjana Untad Palu

**Abstract,** *This study examines the Influence of GDP on Level of Provery in Central Sulawesi in 2013 – 2015. The purpose of this research is to analyze how influence GDP on Level of Provery in Central Sulawesi. The method of analysis used qualitative and quantitative. The type of quantitative research is used to describe of phenomena related to problems on this study. While type of qualiative research is used to analyze the information that can be measured. The result of this study indicate that GDP is not significant effect on Level of Provery. This is due to the increase GDP that occurred in central sulawesi is not always followed by decrease on the level of provery. It can be seen from data of GDP and level of provery in Central Sulawesi in 2013 – 2015.*

**Key words :** *Level of Provery, GDP*

### Pendahuluan

Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan kedaerah-daerah, khususnya

pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Salah satu daerah yang masih memiliki masalah dengan kemiskinan yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.

Sulawesi Tengah adalah salah satu propinsi penyumbang daerah tertinggal

terbanyak dengan 9 kabupaten tertinggal dari 13 kabupaten/kota, sebagaimana yang diumumkan Presiden Jokowi tentang 122 kabupaten tertinggal 2015-2019. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres itu ditandatangani pada 4 November 2015 lalu.<sup>1</sup>

**Tabel 1**  
**Kabupaten Tertinggal 2015-2019 di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	Tertinggal	Tidak Tertinggal
1.	Banggai Kepulauan	√	
2.	Banggai		√
3.	Morowali		√
4.	Poso		√
5.	Donggala	√	
6.	Tolitoli	√	
7.	Buol	√	
8.	Parigi Moutong	√	
9.	TojoUna-una	√	
10.	Sigi	√	
11.	BanggaiLaut	√	
12.	Morowali Utara	√	
13.	Kota Palu		√

*Sumber : Detiknews.com (diolah)*

<sup>1</sup>Detiknews, "Jokowi Tetapkan 122 Kabupaten ini Daerah Tertinggal 2015-2019", diakses dari <http://news.detik.com/berita/3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-2015-2019.html>, pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 15.16 WIB.

Dengan melihat hal tersebut tentunya tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi di Sulawesi Tengah begitu nampak, karena hanya 4 kabupaten yang tidak masuk kategori daerah tertinggal. Pemerintah daerah juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan ini. Khususnya Provinsi Sulawesi Tengah diyakini masih banyak penduduk miskin dan sampai sekarang belum benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak.

Strategi dan instrumen pemerintah dalam penetapan sasaran pertumbuhan secara efektif pada setiap daerah salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, seperti : (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (5) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan (6) Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah otomomi daerah ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, maupun alam pada setiap daerah, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pada setiap daerah, Sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.<sup>2</sup>

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Miskin 2013-2015 di Provinsi Sulawesi Tengah**

Tahun	Tingkat Kemiskinan	
	Jumlah	Presentase
2013	400.40	14.32
2014	387.06	13.61
2015	421.63	14.66

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

*Sulteng*

Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 kemiskinan di paling tinggi dengan presentase 14.66 persen. Dibanding tahun sebelumnya 2014 yang hanya 13.61 persen, atau naik 1.05 persen. Kemudian di 2016 mengalami perbaikan angka kemiskinan, meski tidak signifikan hanya diangka 0,21 persen.

<sup>2</sup> Soekanto,. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 50-55

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.<sup>3</sup>

**Tabel 3**

**Total PDRB 2013-2015 di Sulawesi Tengah (juta rupiah)**

Tahun	PDRB	
	HargaBerlaku	HargaKonstan
2013	79.842.225	68.219.319
2014	90.263.810	71.676.111
2015	107.596.438	82.829.231

Sumber : BPS Sulawesi Tengah (diolah)

Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tengah tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan pada 2013 PDRB atas harga berlaku 79,8 triliun rupiah, naik di tahun berikutnya yang

<sup>3</sup> DoniMahardika, RekhediPriyoSantoso, "AnalisisPerubahanKetimpanganPendapatan Dan PertumbuhanEkonomiAntarProvinsi di Indonesia 2006-2011". *Journal Of Economics and Policy*. Vol. 6.No. 2, 2013, hlm 182-184.

mencapai 90,2 triliun rupiah dan 2015 pencapaian yang cukup baik 107,5 triliun rupiah. Begitu pula pada PDRB atas harga konstan yang juga membaik dari tahun ke tahun. Dari 68,2 triliun rupiah pada 2013, naik 71,6 triliun rupiah pada tahun berikutnya dan di 2015 mencapai 82,8 triliun rupiah.

Dari data diatas bahwa segala kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai ekspektasi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan ril perkapita. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikan Negara ini adalah memajukan dan meningkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif,

mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula.

Penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan penting dilakukan, tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana hubungan seberapa besar pengaruh dari variabel PDRB tersebut terhadap tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah. Pada akhirnya dapat diketahui kebijakan-kebijakan apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalahkemiskinan. Melalui latar belakang tersebut, peneliti bertujuan untuk menjelaskan “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2015”.

## **Kajian Teori**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi

atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus-menerus memungkinkan negara-negara industri maju memberikan segala sesuatu yang lebih kepada warga negaranya, sumberdaya yang lebih banyak untuk perawatan kesehatan dan pengendalian polusi, pendidikan universal untuk anak-anak, dan pensiun publik.

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Menurut tokoh ekonomi klasik dalam, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam sistem produksi suatu negara, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum
- b. Bagi pertumbuhan suatu perekonomian
- c. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja
- d. Luas tanah yang dapat dipergunakan dalam proses produksi

e. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warganegara dan milik penduduk di negara-negara lain. Biasanya dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap.

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

## 2. Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Robert Chambers (2010) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- a. Kemiskinan (*proper*);
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*);
- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*);
- d. Ketergantungan (*dependence*); dan
- e. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Ada banyak penjelasan mengenai penyebab kemiskinan, salah satunya adalah adanya keterbelakangan perekonomian pada suatu wilayah. Penduduk negara

tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi tradisional, serta sikap apatis terhadap lingkungan (Kuncoro, 2006). Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak).
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili

oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran, dan pendidikan rendah dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Anggota keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan kejahatan dan menjadi korban kejahatan. Menurut Kuncoro kemiskinan dapat disebabkan oleh :<sup>4</sup>

- a. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
- b. Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.

Jika dilihat secara makro maka kemiskinan muncul akibat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga akan menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan maka akan bermuara

---

<sup>4</sup> Kuncoro, . *Kesenjangan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004). hlm. 69

pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*).<sup>5</sup>

Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

---

<sup>55</sup> Kuncoro, . *Kesenjangan Ekonomi ...*,

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Kemiskinan merupakan istilah yang umum, ditandai dengan tidak mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang dianggap layak, namun kemiskinan itu memiliki ciri yang berbeda antar wilayah. Perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan setempat. Ciri-ciri kelompok penduduk miskin yaitu :

- a. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan.

- b. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

- c. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja).

- d. Kebanyakan berada di daerah pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area)

- e. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan social lainnya.

Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis, pengamen dan pengangguran.<sup>6</sup>

### 3. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan

---

<sup>66</sup> Kuncoro, . *Kesenjangan Ekonomi ...*,

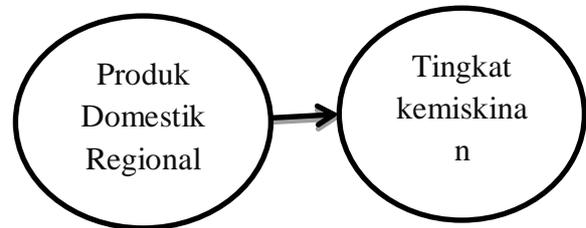
dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.<sup>7</sup>

Menurut Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.<sup>8</sup>

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada telaah pustaka yang ada, diduga bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh

terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Hipotesis:

1. H<sub>0</sub> : Tidak ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel PDRB terhadap variabel Tingkat Kemiskinan.
2. H<sub>1</sub> : Adanya pengaruh yang nyata (signifikan) variabel PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan.

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi jenis penelitian deskriptif kualitatif (data yang dapat diukur). Penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan adalah model analisis regresi linier sederhana dengan

<sup>7</sup>Tambunan,., *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). hlm. 98

<sup>8</sup> Kuncoro,., *Kesenjangan...*, hlm. 98

menggunakan data PDRB dan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dari BPS.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

## 3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. Model ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang diolah melalui program SPSS Versi 21.0, maka besarnya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah akan dapat diketahui. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik.

Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan dapat digambarkan dengan fungsi:

$$Pov = f(PDRB)$$

$$Pov = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \mu$$

Dimana:

- Pov : Persentase penduduk miskin (dalam persen)
- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (dalam jutaan rupiah)

$\beta_0$  : *Intercept*

$\beta_1$  : Koefisien regresi

$\mu$  : *error term*

## Definisi Operasional Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkanseluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah barang dan jasa akhir yangdihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
2. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhandasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

## Hasil dan Pembahasan

**Tabel 4**  
**Koefisien Regresi Uji Signifikas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-13.379	58.903		-.227	.858
PDRB	1.504	3.213	.424	.468	.721

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

*Sumber: Output SPSS, berdasarkan hasil data penelitian*

Persamaan regresi pada tabel 4 memberikan gambaran mengenai pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa PDBR tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat dari  $t$  hitung = 0,468 dengan nilai signifikansi  $0,721 \leq$  nilai probabilitas 0,05, maka  $H_0$  di terima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti tidak adanya pengaruh PDBR terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Kuznet dalam Tambunan (2001) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai pengaruh yang kuat, karena pada awal pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap terakhir pembangunan jumlah kemiskinan berangsur-angsur berkurang. Tidak signifikansinya variabel PDRB dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan juga dapat terlihat dari peningkatan PDRB di Sulawesi Tengah dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak selalu diiringi dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah.

### Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB yang terjadi di Sulawesi Tengah tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah, hal tersebut terlihat dari data PDBR dan tingkat Kemiskinan di Sulawesi tengah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

### Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Sulteng, "Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah" <http://http://sulteng.bps.go.id/index.php>. pada hari pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 15.16 WIB.
- Detiknews, "Jokowi Tetapkan 122 Kabupaten ini Daerah Tertinggal 2015-2019", diakses dari <http://news.detik.com/berita/3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-2015-2019.html>, pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 15.16 WIB.
- DoniMahardika, Rekhedi Priyo Santoso, "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011". *Journal Of Economics and Policy. Vol. 6. No. 2, 2013*, hlm 182-184.
- Kuncoro,. Kesenjangan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga, Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2004
- Soerjono,. Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Tulus, H. Tambunan. Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001
- Prawirokusumo, Soekarno. Ekonomi Rakyat : Konsep, Kebijakan dan Strategi, Yogyakarta : BPFE. 2001